**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA BERENCANA OLEH PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PROVINSI RIAU TAHUN 2018-2020**

Oleh : Afriani Maisyarah

Email : mayaapriani.maysharah@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Broadly speaking, Family Planning Population is wrong an effort from the central government through the BKKBN to mobilize people live more prosperous and quality by using the Budget State Income and Expenditures (APBN). Based on Law Number 52 2009 concerning Population Development and Family Development in article 53 paragraphs 1 and 2 says that BKKBN is an institution Non-Ministry Government (LPNK) which is under the President and responsible to the President. For population control the Family Planning Population and Development program Family (KKBPK), which at the end of 2019 BKKBN packed KKBPK became the Family, Population and Family Development Program Berplan which is abbreviated as Proud Kencana.

The purpose of this research is to know the Implementation of the Family program Planning by Representatives of the Population and Family Planning Agency National Program (BKKBN) for Riau Province in 2018-2020. In this study the author using a type of descriptive research with a qualitative approach. Location This research was conducted in the city of Pekanbaru and data collection at the Representative Office Provincial National Population and Family Planning Agency (BKKBN) Riau. Data collection techniques carried out are through interviews and documentation.

The data analysis technique used is the data analysis model. The results of this study are increasing population growth increasing is a problem that occurs in Riau at this time. In this research using indicators according to Brinkerhoff & Crosby. But there are some variables that do not run optimally such as lack of development constituencies, the lack of accumulation and mobilization of resources and action resulted in many people not knowing the importance of family planning. However BKKBN Representative for Riau Province carried out innovative activities with KIE for the community to participate in the implementation of the program. Like the implementation of the Family Planning program known as Bangga Kencana carried out by the BKKBN Representative for Riau Province controlled population explosion. But the phenomenon is happening now the program is not running well. Another obstacle is the lack of mobile service cars that are carried out and the lack of a team working KB operational.

Keywords: Policy, Family Planning Program, Population

PENDAHULUAN

Permasalahan kependudukan di Indonesia saat ini adalah jumlah penduduk yang besar dan laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi disbanding dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk di Indonesia akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan baik ekonomi hingga aspek sosial. Keberadaan jumlah penduduk di Indonesia pada saat ini menunjukkan sisi kualitas penduduk yang belum baik. Dilihat dari jumlah penduduk di Indonesia hingga tahun 2020 mencapai 270,2 juta jiwa. Setiap tahunnya bertambah sekitar 3,26 juta jiwa pada kurun waktu 2010-2020. Rata-rata kenaikan jumlah penduduk nasional sekitar 1,25%.

Sementara itu jumlah penduduk Provinsi Riau pada tahun 2020 tercatat sebanyak 6,39 juta jiwa dengan rata-rata sebesar 1,40% pertahunnya. Berdasarkan sensus dari 2010-2020 terjadi pelonjakan penduduk sekitar 855,72 ribu jiwa dengan persentase sekitar 2,18%. Persentase tersebut menurun dibandingkan dengan persentase pada dekade sebelumnya sekitar 3,58%.

Oleh karena itu dibutuhkan program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dari program-program pemerintah tersebut salah satunya adalah program yang terkait dengan bidang kependudukan. Instansi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hal ini sesuai dengan peran BKKBN yang memiliki peranan dalam Pembangunan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera saja namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk.

Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 56 sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menekan kewenangan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk lebih memfokuskan pada masalah Pengendalian Penduduk.

Dalam rangka penguatan

program KKBPK yang diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menjadi masalah yang cukup serius apabila tidak segera mendapat pemecahannya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak terkendali akan berpengaruh terhadap semakin menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan keluarga. Bahkan bisa memicu terjadi kemiskinan.

Hal ini sama seperti peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Riau yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa Riau memiliki masalah yang serius, khususnya untuk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau yang mempunyai tanggung jawab hal tersebut.

Tabel Jumlah Penduduk Provinsi Riau Tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah Penduduk
2014	6.188.442
2015	6.344.402
2016	6.500.971
2017	6.657.911
2018	6.814.909
2019	6.971.745
2020	6.989.534

Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan Tabel diatas bertambahnya jumlah penduduk terus menerus dapat menimbulkan tantangan baru untuk pemerintah 10 tahun kedepan. Pada tahun 2020 sampai dengan 2030 mendatang Indonesia akan dihadapkan pada bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari penduduk usia non produktif, yaitu anak dan kelompok usia lanjut. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan pembangunan karakter bangsa, oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan secara serius terutama dimulai dari keluarga untuk menghadapi tantangan kedepan.

Jumlah Peserta KB Aktif Provinsi Riau Tahun 2017-2020

Tahun	Jumlah Akseptor
2017	735.830
2018	737.439
2019	807.748
2020	839.903

Dilihat dari tabel diatas terlihat jelas dari tahun ketahun terjadi peningkatan, namun penambahan penduduk juga terjadi terus menerus dan tidak sesuai dengan pencapaian yang diterima. Pencapaian tersebut belum cukup untuk menekan laju pertumbuhan penduduk tersebut. Perwakilan BKKBN Provinsi Riau banyak melakukan cara untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dengan beberapa program yang telah dilimpahkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pemerintah pusat yaitu program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang di *rebranding* dengan istilah “Bangga Kencana” yang memiliki tujuan dan fungsi yang sama yaitu ada beberapa sasaran strategis yang dilakukan seperti :

1. Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun).
2. Meningkatkan Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR).
3. Menurunkan Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi.
4. Menurunkan Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet need*).
5. Meningkatkan Persentase Peserta KB Aktif MKJP.
6. Meningkatkan Peserta KB Aktif Tambahan.

Berdasarkan beberapa program tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rencana Strategis dari Perwakilan BKKBN Riau ada beberapa Program yang dijalankan, dan masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mensukseskan Program KKBPK yang di berikan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu berdasarkan beberapa program tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020”. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan dari program tersebut yang ada di Riau.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana oleh Perwakilan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020 ?

2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020 ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Keluarga Berencana oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi terhambatnya Implementasi Program Keluarga Berencana oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020.

Kerangka Teori

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Passolong, Harbani, 2008). Sedangkan kebijaksanaan adalah berkenaan dengan suatu keputusan yang membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan asas-asas tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat dan lain-lain. Kebijakan publik menurut William N. Dunn adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Dunn, William N, 2003).

Berbeda pula menurut Suharto yang mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Suharto, Edi, 2005).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rincian program yaitu bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan;
2. Alokasi sumber daya yaitu bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
3. Keputusan yaitu bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya (Pülzl & Treib, 2007).

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebijakan publik itu:

1. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat pemerintah, maksudnya adalah keputusan-keputusan yang diambil itu diputuskan oleh pejabat pemerintah berupa tindakan-tindakan untuk melakukan sesuatu;
2. Kebijakan publik orientasinya harus untuk kepentingan masyarakatnya;
3. Kebijakan publik adalah kebijakan yang terdiri dari beberapa pilihan atau alternatif untuk diambil dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat/publiknya.
4. Kebijakan publik adalah kebijakan yang pelaksanaan keputusannya memiliki tahapan/aktivitas/program kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, atau kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan.

Pada intinya terdapat tiga prinsip kebijakan yang menjadi fokus utama yaitu, perumusan, pelaksanaan, dan penilaian. Studi implementasi adalah untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak program pemerintah yang tidak bisa dilakukan dengan baik.

2. Implementasi

Implementasi Kebijakan menurut Riant Nugroho pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan yang dapat dibentuk yaitu program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. (Nugroho D, Riant, 2004).

Menurut Grindle “Implementasi kebijakan pada dasarnya ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks kebijakan”. Isi kebijakan menunjukkan kedudukan pembuat kebijakan sehingga posisi kedudukan ini akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan, konteks kebijakan ini meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor-aktor yang terlibat.

Daniel A Mazmanian dan Paul A. Sebatier menyebutkan bahwasanya implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah sebuah program atau peraturan dinyatakan berlaku dan dirumuskan adalah sebuah fokus implementasi kebijakan, mengenai kejadian atau kegiatan yang timbul setelah diberlakukannya kebijakan dengan cakupan usaha untuk administrasi maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Wahab Sholichin, Abdul, 1997).

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik adalah berkenaan dengan badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk merealisasikan dan melaksanakan program juga menimbulkan ketaatan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Brinkerhoff dan Crosby implementasi kebijakan memiliki beberapa variabel-variabel yang harus diperhatikan agar proses implementasi dapat berjalan dengan baik. (Brinkerhoff & Crosby, 2002). Variabel tersebut yaitu:

1. Legitimasi Kebijakan.
2. Pengembangan Konstituen.
3. Akumulasi Sumber daya.
4. Desain Organisasi dan Modifikasi.
5. Memobilisasi Sumber daya dan Aksi.
6. Pemantauan Kemajuan dan Dampak Perubahan Kebijakan.

Beberapa variabel diatas merupakan variabel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yang menurut peneliti cocok dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Program Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan jarang bermuatan politis karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan.

Jadi Implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan ke dalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Sementara itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang ditentukan, yaitu melihat pada *action* program dari individual *project* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

a. Legitimasi Kebijakan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau

Dalam penerapan kebijakan, pembuat keputusan kunci harus melihat kebijakan yang diusulkan, sebagai legitimasi yang bisa didapatkan namun sebelum itu perihal tersebut memiliki perencanaan yang melibatkan beberapa kelompok individu ataupun organisasi. Kegiatan tersebut bisa berupa bentuk program, kemudian dalam pelaksanaan program tersebut melibatkan beberapa kelompok dan individu yang bertugas untuk menyampaikan berupa edukasi langsung kepada masyarakat terutama kepada keluarga pasangan subur. Edukasi tersebut dilakukan agar memberikan pengetahuan kepada masyarakat pentingnya keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Edukasi tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti diadakan sosialisasi langsung ke kecamatan.

Berikut adalah perencanaan yang dilakukan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau yaitu dengan melakukan Bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang bisa dikenal dengan KIE. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 32 dan Pasal 33.

KIE bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Keluarga Berencana. KIE dilakukan melalui penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan/atau cara kontrasepsi. Berikut adalah tabel hasil pelayanan peserta KB Baru yang dilayani oleh Faskes KB Provinsi Riau Tahun 2020 menurut metode kontrasepsi yaitu :

Hasil Pelayanan Peserta KB Baru Yang Dilayani Oleh Faskes KB Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi	JUMLAH
1.	IUD	4.541
2.	MOW	3.224
3.	MOP	26
4.	KONDOM	10.191
5.	IMPLAN	14.367
6.	SUNTIKAN	70.319
7.	PIL	39.225
TOTAL		141.923

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tidak berjalannya program pelayanan KB dalam rangka Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) yang merupakan salah satu indikator untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Riau. Berdasarkan data di tabel 3.1 diatas, diketahui juga bahwa hingga tahun 2020 hanya sekitar 141.923 peserta. Sehingga selain indikator Menurunkan Angka Kelahiran Total (TFR) yang tidak berjalan otomatis indikator program meningkatkan pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR) juga terkendala. Berikut adalah data jumlah pasangan usia subur

hingga tahun 2020 yaitu :

Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif
1.	Kampar	206281	129466
2.	Indragiri Hulu	84593	59126
3.	Bengkalis	108472	74029
4.	Indragiri Hilir	167662	107477
5.	Pelalawan	88694	53521
6.	Rokan Hulu	70359	52298
7.	Rokan Hilir	123237	94287
8.	Siak	87747	56390
9.	Kuantan Singingi	62972	46793
10.	Kepulauan Meranti	38591	26725
11.	Pekanbaru	169419	103868
12.	Dumai	47575	35923
Provinsi Riau		1.255.602	839.903

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa, masih banyaknya pasangan usia subur yang tidak menjadi anggota peserta KB aktif. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan alat kontrasepsi sebagai bentuk dari tindakan program keluarga berencana. Dari data tersebut juga dapat diketahui bahwa pelaksanaan program menjadi terhambat dikarenakan masih banyaknya pasangan usia subur yang berpotensi meningkatkan angka kelahiran total dan menghambat program indikator yang lainnya, karena semua indikator program tersebut saling berkaitan satu sama lainnya.

b. Pengembangan Konstituen Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau

Konstituen dalam hal ini adalah masyarakat selaku konsumen dari pelaksanaan program yang diterapkan oleh Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau. Namun rendahnya dukungan dari masyarakat menjadi penghambat pelaksanaan program tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan adanya pemahaman tentang pentingnya keluarga berencana untuk menekan peledakan penduduk yang terjadi di Riau saat ini. Pengembangan Konstituen tersebut dilakukan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti serta dibutuhkan beberapa kelompok pendukung seperti adanya kelompok kegiatan (POKTAN) yang diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Riau. POKTAN tersebut bisa berupa Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Pelaksanaan program-program yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menggunakan pendekatan dengan masyarakat langsung melalui kegiatan POKTAN yang mendukung. Namun kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Keluarga Berencana yang sejahtera mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan program tersebut. Seperti banyaknya kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa KB itu haram, banyak anak banyak rezeki dan larangan adat lainnya. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan terhadap anak bisa terganggu dan bisa memicu terjadinya autisme kepada anak dan pemicu terjadinya stunting. Berikut data tabel hasil Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2020 yaitu :

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) pada tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Sasaran BKB	Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKB
1.	Kampar	13078	7950
2.	Indragiri Hulu	1869	1390
3.	Bengkalis	5575	2415
4.	Indragiri Hilir	10950	6108
5.	Pelalawan	10224	5987
6.	Rokan Hulu	8469	3457
7.	Rokan Hilir	3353	1097
8.	Siak	12147	4819
9.	Kuantan Singingi	10530	7835

10.	Kepulauan Meranti	7584	5556
11.	Pekanbaru	4848	3062
12.	Dumai	885	704
Provinsi Riau		89.512	50.380

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Dari tabel tersebut juga kita bisa melihat bahwa masih banyak anggota keluarga yang belum mengikuti program pemerintah untuk menerapkan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana yang dikenal dengan “BANGGA KENCANA” yang merupakan *Rebranding* dari KKBPK. Selain POKTAN Bina Keluarga Balita, ada juga Bina Keluarga Remaja (BKR) yang dilakukan, berikut adalah data hasil Pembinaan Kelompok Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Riau Tahun 2020 sebagai berikut:

Pembinaan Kelompok Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Riau Tahun 2020

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Sasaran BKR	Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKR
1.	Kampar	7840	3515
2.	Indragiri Hulu	1401	894
3.	Bengkalis	4920	1357
4.	Indragiri Hilir	9676	5182
5.	Pelalawan	11072	2710
6.	Rokan Hulu	5277	1512
7.	Rokan Hilir	3537	729
8.	Siak	1426	725
9.	Kuantan Singingi	5311	3392
10.	Kepulauan Meranti	11235	6745
11.	Pekanbaru	3989	1611
12.	Dumai	1116	548
Provinsi Riau		66.800	28.920

(BKR) di Provinsi Riau Tahun 2020

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran anggota BKR ada sebanyak 66.800 jumlah sasaran BKR. Namun hanya sekitar 28.920 anggota yang menjadi anggota BKR. hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya orang tua yang memiliki anak kategori remaja menikah anak dibawah umur ideal pernikahan. Serta kurangnya partisipasi dari remaja dalam menghadiri acara kegiatan penyuluhan,

edukasi, dan sosialisasi kepada remaja.

Berikut adalah tabel jumlah keluarga yang menghadiri penyuluhan BKR hingga tahun 2020 yaitu sebagai berikut :

Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang Menghadiri Penyuluhan

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah Keluarga Sasaran BKR	Jumlah Keluarga Hadir Dalam Pertemuan
1.	Kampar	7840	1893
2.	Indragiri Hulu	1401	751
3.	Bengkalis	4920	1035
4.	Indragiri Hilir	9676	2914
5.	Pelalawan	11072	1934
6.	Rokan Hulu	5277	767
7.	Rokan Hilir	3537	516
8.	Siak	1426	390
9.	Kuantan Singingi	5311	1608
10.	Kepulauan Meranti	11235	4315
11.	Pekanbaru	3989	851
12.	Dumai	1116	312
Provinsi Riau		66.800	17.286

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

c. Akumulasi Sumber Daya Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau

Salah satu keberhasilan suatu perencanaan adalah adanya sumber daya yang memadai agar terlaksananya program dengan baik. Dalam mengimplementasikan (BKKBN) Provinsi Riau haruslah memiliki sumber daya manusia, teknik, bahan-bahan dan sumber daya keuangan yang memadai. Sementara sumber daya eksternal dapat menutupi sebagian dari yang dibutuhkan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut sumber daya yang dibutuhkan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau masih belum cukup. Pelaksanaan program-program yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN

Provinsi Riau masih belum optimal.

Dikarenakan sulitnya mencari tenaga pendidik yang mau untuk menyampaikan kegiatan program-program yang diterapkan. Sebagian dari masyarakat mengatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat dan sulitnya menggunakan bahasa yang baik serta kurangnya percaya diri masyarakat. Selain itu masalah lainnya adalah banyak masyarakat yang bosan dan enggan untuk mengikuti pelaksanaan program yang ada.

Sumber daya lainnya yang mendukung adalah adanya program KB gratis di seluruh Puskesmas dan adanya kegiatan mobil pelayanan keliling. Kegiatan tersebut dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Namun kegiatan tersebut masih saja tidak menarik keinginan masyarakat untuk melakukan program Keluarga Berencana.

d. Desain Organisasi dan Modifikasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau

Dalam pelaksanaan suatu program dibutuhkan desain organisasi yang tepat supaya dapat mewujudkan suatu keberhasilan dalam suatu kebijakan. Desain organisasi serta melakukan modifikasi dapat menimbulkan masalah, yang menjadi masalah utamanya adalah mengakarnya rutinitas tersebut yang menyebabkan terhambatnya pengenalan tugas baru dan tujuan yang menyertainya. Staf tidak dapat berkomitmen kebijakan baru bahkan menentanginya. Selain itu masalah lainnya adalah kapasitas kemampuan dari staf itu sendiri.

Pelaksanaan program Bangga Kencana yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau melakukan beberapa inovasi seperti melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat, dengan diadakannya kegiatan sosialisasi kepada POKTAN, contohnya sosialisasi kepada keluarga yang memiliki orang tua atau penduduk usia lanjut, yang dikenal dengan istilah Bina Keluarga Lansia (BKL).

Bina keluarga lansia ini dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga lanjut usia.

Kegiatan itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Kegiatan tersebut seperti penyuluhan, kunjungan rumah, rujukan, pencatatan dan pelaporan. Berikut adalah tabel Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKL) pada tahun 2020 yang ada di Riau yaitu :

Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Pada Tahun 2020 di Riau

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Keluarga Sasaran BKL	Jumlah Keluarga Menjadi Anggota BKL
1.	Kampar	8669	4152
2.	Indragiri Hulu	1296	821
3.	Bengkalis	4065	1755
4.	Indragiri Hilir	7709	4821
5.	Pelalawan	8578	2182
6.	Rokan Hulu	4283	1116
7.	Rokan Hilir	3417	536
8.	Siak	1725	1200
9.	Kuantan Singingi	6909	5142
10.	Kepulauan Meranti	6788	4470
11.	Pekanbaru	3058	1808
12.	Dumai	962	599
Provinsi Riau		57.459	28.602

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak hal yang membuat para ibu-ibu yang sudah lanjut usia enggan untuk mengikuti kegiatan POKTAN dari Program yang diterapkan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau tersebut. Jadi sungguh saat masuk akal jika masih banyaknya keluarga Bina Keluarga Lansia yang tidak menjadi anggota dari BKL tersebut.

Berikut adalah tabel Jumlah Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menghadiri penyuluhan pada tahun 2020 di Riau sebagai berikut :

Jumlah Bina Keluarga Lansia(BKL) Yang Menghadiri Penyuluhan

No.	Kabupaten /Kota	Jumlah Pertemuan/ Penyuluhan	Jumlah Keluarga Hadir Dalam Pertemuan
1.	Kampar	58	2070
2.	Indragiri Hulu	25	615
3.	Bengkalis	14	1150
4.	Indragiri Hilir	49	2628
5.	Pelalawan	23	1826
6.	Rokan Hulu	17	775
7.	Rokan Hilir	16	369
8.	Siak	15	693
9.	Kuantan Singingi	41	3157
10.	Kepulauan Meranti	91	2833
11.	Pekanbaru	24	975
12.	Dumai	20	374
Provinsi Riau		393	17.465

Sumber : Dokumen Perwakilan BKKBN Provinsi Riau

e. Memobilisasi Sumber Daya dan Aksi Perwakilan (BKKBN) Provinsi Riau

Pelaksanaan kebijakan diwujudkan dengan perubahan dan kemajuan kedepan yang lebih baik agar terlaksananya kegiatan program yang berhasil. Dalam pelaksanaan tersebut di butuhkan dukungan adanya insentif yang memadai maka mobilisasi sumber daya akan terlaksana dengan lancar. Pelaksanaan program Bangga Kencana yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Riau dalam hal ini didukung dengan insentif yang memadai.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ronaldi Inanda, S.Sos yang merupakan Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi mengatakan bahwa :

“Semua kegiatan yang kami lakukan itu memiliki insentif yang memadai, dari tingkat ibu kota Provinsi sampai dengan desa atau kelurahan yang ada di Riau ini. Hanya saja kami kekurangan tenaga kerja yang mampu dan mau diberikan mandat untuk melaksanakan program kegiatan yang ada didaerah terpencil, seperti daerah pelosok yang jaraknya jauh dari daerah perkotaan. Kebanyakan warga dari daerah

tersebut mengatakan tidak bisa menggunakan bahasa yang baik dan tidak memiliki pengetahuan mengenai kegiatan tersebut. Bahkan dari masyarakat mengatakan kegiatan tersebut tidak berguna atau tidak ada manfaatnya.”(**Hasil wawancara bersama Bapak Ronaldi Inanda, S.Sos yang merupakan Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi**).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan program agar mendukung terlaksananya program kegiatan yang diberikan oleh pemerintah agar bisa menekan laju pertumbuhan penduduk yang ada di Riau ini. Belum lagi kebiasaan pemikiran masyarakat menganggap bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki manfaat bagi mereka. Belum lagi sulitnya mencari kader yang mampu dan mau untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan di daerah pelosok. Mereka beralasan bahwa kegiatan tersebut tidak menghasilkan apapun, mereka lebih memilih untuk melakukan kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Bapak Nurhamzalis, S.H yang merupakan Kepala Bidang Kesertaan KB Jalur Wilayah dan sasaran Khusus yang mengatakan bahwa :
“Kegiatan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan yang kami lakukan tidak mendapatkan partisipasi dari masyarakat, mereka enggan menghadiri acara yang kami adakan, bahkan disuatu daerah yang jauh dari jangkauan perkotaan yang sungguh memprihatinkan. Karena di daerah tersebut merupakan sasaran utama kami. Karena sebagian daerah tersebutlah banyak masyarakat yang belum menjadi anggota dari kegiatan program yang kami lakukan”(**Hasil wawancara bersama Bapak Nurhamzalis, S.H yang merupakan Kepala Bidang Kesertaan KB Jalur Wilayah dan sasaran Khusus**).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor utama terhambatnya program program kegiatan yang dilakukan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau untuk menekan lajunya pertumbuhan penduduk yang ada di Riau saat ini. Ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab terhambatnya kegiatan ini adalah susahnya masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang lebih baik, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ibu Asrahlailli sebagai Ibu yang memiliki balita, beliau mengatakan bahwa :

“Saya bukan tidak mau menggunakan KB, hanya saja suami saya tidak mengizinkan saya menggunakan KB tersebut. Suami saya melarang dengan alasan dia ingin menambah anak dengan jarak yang dekat. Belum lagi didukung dengan adanya anggapan bahwa KB itu haram. Jadi ya saya tidak bisa menolak”(**Hasil wawancara bersama Ibu Asrahlailli yang merupakan Ibu yang memiliki Balita**).

Dari hasil wawancara dengan Ibu Asrahlailli itu, kita dapat mengetahui bahwa sulitnya meyakinkan pemahaman adat istiadat lama yang sudah mengakar. Bahkan tak jarang banyak masyarakat menentangnya dengan keras. Seperti tidak memberikan izin kepada istrinya untuk menerapkan program dua anak saja cukup.

f. Pemantauan Kemajuan dan Dampak Perubahan Kebijakan Perwakilan (BKKBN) Provinsi Riau

Pelaksanaan kebijakan dapat dikatakan berhasil tidaknya dapat dibuktikan dengan adanya perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut bisa menimbulkan dampak yang positif ataupun negatif. Keuntungan yang lebih besar bisa terjadi meningkatnya kegiatan yang dilakukan. Namun hal tersebut pastinya ada pemantauan kemajuan dalam bentuk indikator proses yang sangat penting.

Pemantauan Tersebut dilakukan agar menghindari terjadinya dampak buruk yang kemungkinan bisa terjadi. Pemantauan ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan oleh manajer dan pimpinan lembaga memenuhi kewajiban yang telah di tentukan. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh untuk bisa dilakukan evaluasi dari hasil implementasi kebijakan yang dilakukan.

Pemantauan ini dilakukan langsung Pemerintah pusat yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memantau langsung dengan diadakannya Program Laporan Kinerja yang wajib diserahkan setiap satu periode atau setiap 5 tahun sekali untuk memantau kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan di setiap daerah yang sudah dilimpahkan langsung.

2. Faktor Penghambat Perwakilan (BKKBN) Provinsi Riau Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam pelaksanaan kegiatan program yang dilakukan oleh Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut terjadi karena beberapa faktor. Baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Berikut adalah penjelasan faktor penghambat yang dialami oleh Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau.

a. Faktor Internal

Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau memiliki hambatan yang terjadi. Salah satunya adalah kurangnya kader dalam melaksanakan program tersebut.

Kurangnya Tim Penggerak yang bisa diberikan mandat untuk melaksanakan kegiatan program yang dilakukan di beberapa daerah yang jauh dari jangkauan tim kader provinsi. Selain itu sulitnya menerapkan kegiatan kepada

pekerja kader baru yang ada di kantor pusat.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Betty Syandra, S.E yang merupakan sebagai Widyaiswara di Bidang Pelatihan dan Pengembangan sebagai berikut :

"Sebenarnya saya baru saja bekerja disini, jadi saya masih beradaptasi dengan kegiatan program yang ada. Saya tidak tau bagaimana kegiatan yang dilakukan kader sebelumnya, yang jelas saya melakukan kegiatan pengembangan kegiatan sesuai dengan kegiatan kelompok yang sudah diterapkan seperti BKB, BKL dan BKR)". (Wawancara bersama dengan Ibu Betty Syandra, S.E yang merupakan sebagai Widyaiswara di Bidang Pelatihan dan Pengembangan).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa kurangnya kualitas sumber daya manusia dari staf yang ada di kantor Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau masih belum memadai. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak juga staf yang bekerja tidak sesuai atau tidak optimal. Masalah faktor lainnya adalah kurangnya pelayanan mobil keliling yang diterapkan. Kegiatan Muyan tersebut tidak sampai ke daerah yang jauh dari perkotaan. Sementara banyaknya kapasitas masyarakat memerlukan pelayanan tersebut ada di daerah yang jauh dari perkotaan seperti di desa ataupun kelurahan.

b. Faktor Eksternal

Selain dari faktor Internal Perwakilan Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau juga mempunyai hambatan dari faktor eksternal dalam mengatasi permasalahan lajunya pertumbuhan penduduk yang ada di Riau saat ini.

Faktor tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program Keluarga Berencana yang dikenal dengan Bangga Kencana. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat, membosankan, dan bahkan ada yang beranggapan bahwa KB itu haram.

Selain itu ada juga masyarakat Lansia yang mengatakan bahwa malasnya mengikuti penyuluhan tersebut karena jauhnya tempat kegiatan dan kegiatan tersebut tidak menarik minat para ibu-ibu yang termasuk kategori lanjut usia.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi adalah luasnya daerah Riau ini mengakibatkan tidak tersampainya kegiatan secara menyeluruh. Sulitnya mencapai daerah yang jauh dari Provinsi mengakibatkan sulitnya para tim operasional KB dan kader penggerak lainnya. Sulitnya mencari kader di daerah mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan tersebut. Jika tim operasional KB dari pusat yang turun lapangan akan memakan waktu dan tumpang tindihnya jabatan. Sulitnya mencari tim pelaksana tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh Bapak Ronaldi Inanda, S.Sos yang merupakan Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi mengatakan bahwa :

“Semua kegiatan yang kami lakukan ini pasti selalu didata dan dilaporkan, masalah tersebutlah menjadi alasan masyarakat tidak mau menjadi anggota tim penggerak ataupun pelaksana operasional kegiatan yang kami lakukan. Mereka mengatakan bahwa tidak mengerti bagaimana menggunakan dan mengaplikasikan komputer dan internet. Karena itulah sulit kami mencari orang yang mau melakukan kegiatan program yang kami lakukan. (Hasil wawancara bersama Bapak Ronaldi Inanda, S.Sos yang merupakan Sub Koordinator Bidang Data dan Informasi).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa kegiatan program kegiatan yang dilakukan tidak didukung oleh masyarakat yang ada di daerah tersebut dan bahkan menolak langsung untuk melakukan kegiatan program Keluarga Berencana.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Program Keluarga Berencana oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau Tahun 2018-2020 dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan tersebut menggunakan model implementasi menurut Brinkerhoff dan Crosby yang mengatakan bahwa ada beberapa variabel yang harus diperhatikan.

Berdasarkan variabel tersebut hasil penelitian yang saya lakukan terdapat beberapa kegiatan program yang belum berjalan dengan optimal. Seperti masih banyaknya kegiatan kelompok yang belum berjalan, contohnya Bina Keluarga Balita (BKB), Bina keluarga Remaja (BKR) dan Bina keluarga Lansia (BKL) yang tidak terlaksana secara menyeluruh. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor.

Faktor internal tersebut adalah kurangnya mobil pelayanan keliling dan tim operasional penggerak KB untuk melaksanakan kegiatan POKTAN. Serta sumber daya manusia yang tidak memadai dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Berencana. Kurangnya Tim Kader dalam pelaksanaan kegiatan mengakibatkan terhambatnya kegiatan tersebut. Mengakibatkan banyaknya tingkat angka kelahiran yang tidak terkendali serta secara otomatis meningkatkan *Unmet Need*.

Faktor eksternal yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program Keluarga Berencana yang dikenal dengan Bangga Kencana. Masyarakat menganggap bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki manfaat, membosankan, dan bahkan ada yang beranggapan bahwa KB itu haram. Selain itu ada juga masyarakat Lansia yang mengatakan bahwa malasnya mengikuti penyuluhan tersebut karena jauhnya tempat kegiatan tersebut.

Selain itu kegiatan tersebut tidak menarik minat para ibu-ibu yang termasuk kategori lanjut usia. Selain itu faktor lain yang mempengaruhi adalah luasnya daerah Riau ini mengakibatkan tidak tersampainya kegiatan secara menyeluruh.

Saran

1. Hendaknya dalam pelaksanaan program kelompok kegiatan atau POKTAN dilakukan lebih ditingkatkan lagi karena faktor utama dalam pelaksanaan program ini adalah terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat agar dapat melaksanakan kegiatan serta mau mengikuti pelayanan yang telah di sediakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau.
2. Lebih ditingkatkan lagi kegiatan Mobil Pelayan Keliling atau Muyan dan Tim Operasional KB. Serta memberikan pelayanan sampai keseluruhan daerah yang ada di Riau, khususnya daerah kelurahan atau desa. Sebab daerah tersebut yang menjadi sasaran khusus dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Hendaknya sumber daya manusia yang ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan program tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi sesuai dengan koordinasi dan standar operasional yang berlaku.
4. Perlu ditambahkan media khusus seperti menggunakan media sosial internet yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini seperti akun media sosial dengan cara mengajak dan memberikan iklan ke stasiun televisi ataupun ke media elektronik lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. (2000). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brinkerhoff, Crosby. (2002) *Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision Makers in Development and Transitioning Countries*. West Hartford, Kumarian Press.
- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Edward III, Goerge. C. (1980). *Impelementation Public Policy*. Washington:

Congressional Quarterly Press.

- Islamy, I. (2010). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M.S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43-62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Narbuko, Kholid; Ahmadi, H. Abu. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Passolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Patilima, Hamid. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayang; Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Strauss, Anslem; Corbin, Juliet. (2003). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. (2005). *Analisa Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S.Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group
- Wahab Sholichin, Abdul. (1997). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- ### Skripsi/Jurnal
- Denamari, Emaretta&Nazaki, Afrizal. (2018). *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Pada Kelurahan Tanjungpinang Barat)*.

- Diannanda, Yovensius Yoni. (2019). *Implementasi Kebijakan Program Kampung Keluarga Berencana di Desa Riam Tapang Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat*.
- Rizqi Bachtiar, M. Irfan Islamy, Bambang Santoso Haryono. (2014). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Dan Peningkatan Kualitas Penduduk Di Tulungagung Ditinjau Dari Teori Brinkerhoff Dan Crosby*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Malang Jurnal Administrasi Publik (Jap). Vol. 1. No. 4
- Ramdhani, A., & Ramdhani. M. A. (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik. Vol. 11. No. 01
- Fitri. (2018). *Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Makassar*.
- Pepy Novia Hidayah (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan Taktakan Kota Serang*.
- Rante, Alfrida Toding, dkk. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Bengkulu (Studi Pada Kantor Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bengkulu)*. Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 5 No. 1
- Rosa Pasrah S.D, dkk. (2014). *Efektivitas Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jom FEKON Vol. 1 No.2
- Yulian Widya Saputra, Lukas, Titin A, Riska Susmei Rindantya. *Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana (KB)*. Prodi Pendidikan Geografi Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur. Vol. 4 No.2 Desember 2019. Samarinda
- Zaeni, Akhmad. (2006). *Implementasi Kebijakan program keluarga Berencana di Kabupaten Batang Studi Kasus Peningkatan Kesertaan KB Pria Di Kecamatan Gringsing*.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Sumber lainnya**
- <https://www.bps.go.id>. diakses pada tanggal 2 Desember 2021 pukul 12.30
- <https://riau.antarane.ws.com/berita/182989/1-aju-pertumbuhan-penduduk-riau-capai-359-persen-dan-itu-masih-tinggi>. diakses tanggal 17 Oktober 2020 pukul 14.50
- Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Tahun 2018
- Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Riau Tahun 2019
- Dokumen Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau